

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Arief, Barda Nawawi, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi Ke-2 Cetakan Kedua. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan kesepuluh, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Artasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensi Alisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana (bagian 2)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT. Alumni. Bandung.
- Djumhana, Muhammad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Efendy, Marwan. 2010. *Korupsi dan Pencegahan*. Timpani. Jakarta.
- Girsang, Juniver. 2012. *Abuse of Power. Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. J.G. Publishing. Jakarta.

- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penangulangannya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. RinekaCipta, Jakarta.
- _____,2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *TindakPidanaKorupsi*. SinarGrafika. Jakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidanadan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet.2, Kencana Prenada Kencana, Jakarta.
- Kansil, C.s., 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet VI,BalaiPustaka,
- Lamintang, P.A.F., 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. RinekaCipta Jakarta.

ND, Mukti Fajar. Dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. PustakaPelajar. Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto.1980. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung.

Rukmana,Aan.2009. “Korupsi di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah” dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia*.KompasGramedia. Jakarta.

Rose, Susan-Ackerman, 2006, *Korupsi Pemerintahan : Sebab, Akibat dan Reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Simorangkir, J.C.T dan Rudy J. Erwin. 2005. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika.

Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 1990, *HukumPidana I*, Cet.2, YayasanSudarto, Semarang.

Soekanto,Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta.

_____,Mamudji, Sri, 1983, *Penelitian Hukum Normatif (suatuTinjauanSingkat)*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.

------. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT.RajaGrafindoPersada. Jakarta.

Sumardjono, Maria SW. 2012,*Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*; Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*.
PT. Suryandaru Utama. Semarang.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Staatsblad*Tahun 1915 No. 732).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981, Tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 3209).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 (prp) tahun 1960 tentang
Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan, Pemeriksaan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No.60,
Tambahan Lembaran Negara No. 2011).

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 No.19, Tambahan Lembaran Negara No. 2958).

Undang – undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 No.40, Tambahan Lembaran Negara No. 3874).

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No.34, Tambahan Lembaran Negara No. 4150)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.137, Tambahan Lembaran Negara No. 4250).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Jaksa Agung RI No.004/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.

Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti.

C. Website :

Ahmad, 2013, *Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara*,
<http://rakaraki.com/2013/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-keuangan.html>, diakses tanggal 10 Maret 2015.

Ambon Expres. *Korupsi Ambon*. dari website <http://www.kabarinvestigasi.com>.
diakses pada tanggal 1 Februari 2015.

Dewi, Novia Chandra. *Uang Pengganti Kurang karena Koruptor Pilih Jalani hukuman Subsider*. dari website <http://www.detiknews.com>. diakses pada
tanggal 1 Februari 2015.

Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*.
www.kompas.com.diakses pada tanggal 1 Februari 2015.

Maharani, Dian. *Andi Mallarangeng Bebas dari Hukuman Bayar Uang Pengganti Rp 2.5 Miliar*. <http://nasional.kompas.com/read/2014/07/18/18463531/Andi.Mallarangeng.Bebas.dari.Hukuman.Bayar.Uang.Pengganti.Rp.2.5.Miliar>, diakses pada tanggal
1 Februari 2015.

Madusira, Muhammad Aras. 2011. *Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Tesis. UGM. Yogyakarta.
Manao, Hekinus. *Definisi Keuangan Negara Kembali Diperdebatkan*.
Hukumonline. [www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com). diakses pada tanggal 1 Februari
2015.

Musri Nauli, 2013, *Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*,
<http://hukum.kompasiana.com/2013/10/08/kerugian-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi-598568.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2015

Siti Maryam, 2012, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*,
<http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2015.

Transparency International. *Indeks Korupsi: Peringkat Indonesia Membaik. Tapi Masih Buruk* <http://www.dw.de/indeks-korupsi-peringkat-indonesia-membaik-tapi-masih-buruk/a-18107694>. diakses pada tanggal 1 Februari 2015.